

# Tantangan Pendidikan di Era Postmodernisme

**Fathur Rahman**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Abstract:** *This paper discusses three major issues, namely how the image of the objective conditions of Islamic education, age and postmodernism as an intellectual thought movement that could be a challenge as well as how the strategic steps that should be taken to realize the civil society Muslims in Indonesia. Factually, renewal of Islamic education becomes an absolute necessity is manifested as a significant prerequisite in creating Muslim intelligent, energetic resources, committed against Islam and good manner. The other hand, it has become anticipation and protection against any negative thoughts brought postmodernism in various variants, for example: humanism, liberalism, asceticism (spirituality) and so on. The other side becomes a tool device as a prerequisite to realize an order of civil society in this millennium era. It shall be the duty and responsibility of moral, social, intellectual and great historical that should be fulfilled by the Muslims in general and for the upper middle class in particular.*

**Keywords:** *Values Education, Postmodern, and Human Stuttering.*

## Pendahuluan

Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam

keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.<sup>1</sup> Sejalan dengan itu, pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses manusia atau peserta didik secara sadar, manusiawi yang terus-menerus agar dapat hidup dan berkembang sebagai manusia yang sadar akan kemanusiannya. Demikian pula kesadaran serta kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi kehidupan yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Pendidikan Islam sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional dari sejak dulu secara telaten dan serius melalui lembaga pendidikan formal, non formal dan informal, telah membina dan mencetak sumber daya insani yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing menjadi kader dan pemimpin bangsa. Bahwa kesadaran dan komitmen moral bangsa kita yang mayoritas beragama Islam cukup mendalam, memahami reaktualisasi pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya sebagai salah satu upaya yang optimal untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf kualitas kehidupan mereka dalam berbagai aspek kehidupan pada satu sisi, serta pada sisi yang lain upaya dengan jalur pendidikan tersebut menjadi sarana bagi mereka untuk memberantas penyakit 4 K (kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan ketakberdayaan) yang mereka alami selama ini. Dengan kata lain, bahwa melalui jalur pendidikan mereka akan terbebas dan tercerahkan dari berbagai macam belenggu kehidupan.

Memasuki abad XXI di millennium ketiga ini yang digambarkan oleh banyak ahli dan pakar untuk jauh ke depan diprediksi sebagai era postmodernisme yang inti pokok alur pemikirannya adalah menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan baku, menolak dan menghindari suatu sistematika uraian atau pemecahan masalah yang sederhana dan sistematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai aneka ragam sumber.<sup>2</sup> Terlepas dari suka ataukah tidak, sadar ataukah

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A Gani, dkk. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 157.

<sup>2</sup> M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka

tidak, kita semua akan memasuki era dan kancah arus pemikiran spektakuler yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lainlain sebagai dampak dan pengaruh globalisasi. Sebagaimana halnya dengan globalisasi tersebut, arus pemikiran postmodernisme juga sekaligus membawa sisi positif dan negatifnya. Masalahnya sekarang adalah apakah umat Islam akan keciprat dan tenggelam dalam arus negatifnya, menjadi *victim* atau korban, atautkah sebaliknya akan menjadi pengendali dan pengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian pula halnya dalam konteks *civil society* yang mengandung makna sebuah masyarakat madani. Adalah sebuah lontaran pemikiran dari Barat yang bersifat setali tiga uang, atau serupa tapi tak sama. Terlepas dari pro dan kontra, penulis tetap memakai ungkapan tersebut, *ittiba'* kepada pakar Muslim yang cenderung menyamakan makna *civil society* dengan masyarakat sipil atau masyarakat madani (masyarakat kota yang berperadaban) lawan dari masyarakat nomad dan badwi (masyarakat yang tetap, statis).<sup>3</sup>

Permasalahan pendidikan dalam menggeluti postmodernisme adalah, bahwasanya peran dan tugas pendidikan dalam era postmodernisme yang bersifat antisipasi, preventif-protektif, dan rehabilitasi terhadap masalah-masalah kompleks yang timbul dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, misalnya pola budaya individualistis, hedonistis, konsumeristis, permissif (serba boleh) dan bahkan chauvinistis (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan). Di bidang sosial-kemasyarakatan, bermunculan masalah yang bersifat krusial dilematis, seperti semakin berkembangnya jurang pemisah yang semakin dalam antara yang kaya dengan yang miskin, antara kaum terdidik dan yang terbelakang yang bekerja secara profesional dengan kemampuan SDM yang tinggi dengan kelompok kerja, namun masih amatiran dan bahkan dalam jumlah yang besar masih berada dalam taraf pengangguran (*unemployment*).

---

Pelajar, 1995), 96-97.

<sup>3</sup> Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, terj. Ilyas Hasan (Jakarta: Mizan, 1995), x.

Dalam masyarakat yang serba maju tersebut, seiring dengan dampak yang terjadi mengakibatkan banyak orang dan pihak lain tersisih dan terisolir dari pergaulan masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga berbagai bentuk kejahatan dan kriminalitas, pelanggaran undang-undang, peraturan serta norma etika agama akan terabaikan dan semakin merajalela.

Ormas, parpol, LSM-LSM dan berbagai badan advokasi masyarakat lainnya yang bertugas dan berperan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan tetap dihimbau dan didambakan agar semakin memantapkan peran dan fungsinya, niscaya kompleksitas permasalahan pendidikan menyongsong postmodernitas tersebut mampu direspons dan diselesaikan secara tuntas.

Harapan-harapan tersebut ingin dicapai dengan pendidikan dalam menghadapi *civil society*, yang pada gilirannya menunjukkan urgensinya pendidikan Islam. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan dan bahkan yang paling terdepan dalam rangka proses pembangunan suatu bangsa. Menjadi kunci utama atau titik perhatian utama bagi setiap komponen masyarakat yang berkompeten terhadap pendidikan tersebut. Untuk lebih proaktif melakukan langkah-langkah dan upaya strategis pendidikan di masa depan, baik melalui jalan formal, non-formal maupun in-formal. Dengan melalui jalur pendidikan tersebut akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang kualitas dan berwawasan luas, sehingga mereka mampu mengisi setiap lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan bidang atau jurusan mereka masing-masing.

Dalam hal ini, tugas dan peranan pendidikan adalah amat sulit dan kompleks. Walaupun demikian, langkah-langkah tersebut harus ditunaikan dengan secara maksimal. Pada satu sisi, pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia seperti yang dikriteriakan di atas, yakni memiliki kualifikasi, berwawasan luas dan profesional di bidangnya masing-masing. Namun pada sisi yang lain, pendidikan juga harus mampu membenahi diri secara internal (ke dalam). Misalnya institusi

kelembagaan, manajemen modern, kompetensi dan sebagainya.

Hal tersebut di atas, merupakan harapan-harapan yang ingin dicapai dengan pendidikan menghadapi *civil society* sebagai sebuah gambaran masyarakat yang memiliki tingkat peradaban dan kemajuan yang amat maju di segala bidang. Pada saat yang demikian itu pula, maka pendidikan Islam berada pada posisi terdepan dan amat strategis, yakni memberikan sumbangsih pendidikan yang bermuatan dan bernuansa etik, moral, mental-spiritualitas keagamaan bagi bangsa kita.

## Asal Usul Postmodernisme

Istilah *postmodernisme* pada awalnya muncul di bidang arsitektur, kemudian menjadi istilah yang cukup populer di dunia sastra-budaya sejak 1950 dan 1960-an. Di bidang filsafat dan ilmu-ilmu sosial baru mengemuka pada sekitar 1970 dan 1980-an. Namun, tak ada definisi yang pasti mengenai istilah tersebut. Sebab, sejak istilah itu dilabelkan pada berbagai bidang tersebut di atas, dipelopori oleh banyak tokoh dengan seluruh variasinya, kadang ia masih bertentangan.<sup>4</sup>

Dalam arsitektur misalnya, istilah *postmodern* lebih menunjuk pada gaya bangunan yang mencoba melepaskan diri dari kaidah-kaidah arsitektur modern atau gaya internasional. Corak arsitektur ini telah mendominasi gaya arsitektur di seluruh dunia hampir setengah abad lamanya, yaitu sejak tahun 1920-an. Arsitektur modern ditandai pola-pola terutama rasional, objektif, praktis dan didominasi elemen-elemen seperti material, beton, struktur baja dan kaca. Arsitektur postmodern ditandai bentuk-bentuk asimetris, bata atau kayu sebagai pengganti beton, warna-warna cerah dan ramai, penuh variasi dan kejutan serta harmoni dengan lingkungan dan manusiawi. Bangunan-bangunan dengan ciri khas semacam ini dapat ditemukan di jalan-jalan utama seperti di Jl. Sudirman, Kuningan, Gajahmada, dan kota-kota besar dari Indonesia.

---

<sup>4</sup> Suyoto dan Syamsul Arifin (ed), *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), 38; Moh. Natsir Mahmud, *Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer* (Makassar: PPIM IAIN Alauddin, 2002), 24.

Proyek Kali Code garapan Romo Y.B. Mangunwijaya yang mendapat penghargaan dari Aga Khan 1992 termasuk dalam kategori arsitektur postmodern, karena dianggap sarat dengan nilai kemanusiaan. Dalam satu bangunan, berbagai gaya yang berasal dari berbagai masa sejarah arsitektur dapat digabungkan menjadi satu. Kita dapat melihat aspek-aspek dan contoh tradisional dalam arsitektur postmodern. Gedung Dharmala di pusat Ibu Kota Jakarta merupakan model arsitektur yang tipikal postmodern.<sup>5</sup>

Salah seorang tokoh aliran ini yang cukup kondang adalah Charles Jencks arsitek dan teoretikus Amerika dengan karya *The Language of postmodern Architecture* (1975). Beliau menyebut postmodern sebagai usaha mencari pluralisme gaya setelah puluhan tahun dikungkung oleh satu gaya. Sikap ini dijuluki elektik radikal.<sup>6</sup> Di bidang sastra budaya, kemodernan ditandai dengan kecenderungan untuk mengakhiri cerita dengan penyelesaian tertutup yang justru dicurigai postmodern dan dianggap simplistik atau bahkan delusif, menipu diri sendiri. Di samping itu, sastra modern cenderung mencari satu tatanan atau kaidah yang biasa berlaku umum, sementara sastra postmodern justru sangat menghargai pluralisme. Mikhail Bakhtin, kritikus sastra Rusia, adalah salah seorang tokohnya, meskipun ia tak pernah menggunakan istilah *post-modern*. Bakhtin mengatakan bahwa novel atau sastra postmodern itu bersifat sentrifugal, heteroglat, penuh variasi, eksperimental, fragmentaris, skeptis dan antiotoritas.

Gerakan sastra kontekstual yang dimotori Arief Budiman dan Ariel Heriyanto juga bisa disebut sebagai wakil sastra postmodern di Indonesia.<sup>7</sup> Walaupun istilah postmodern itu telah digunakan sejak 1950-an, konsep ini baru mendapat pendasaran filosofis dari seorang pemikir Prancis kontemporer, Jean Francois Lyotard melalui bukunya, *La Condi-*

---

<sup>5</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, 96.

<sup>6</sup> Secara singkat elastik radikal berarti sesuatu yang mudah diubah bentuknya secara menyeluruh. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 224 dan 718).

<sup>7</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, 39.

*tion Postmodern Raport Sus le Savoir 1979: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1984). Buku ini merupakan laporan untuk Dewan Universitas Quebec di Kanada yang berisi tentang perubahan-perubahan di bidang ilmu pengetahuan dalam masyarakat industri maju, akibat pengaruh teknologi baru sejak saat itulah wacana tentang postmodernisme mulai mencuat hingga saat ini, dan oleh karena itu pulalah beliau dianggap sebagai tokoh utama postmodernisme.

Dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme sering digunakan dengan acuan yang sangat beragam. Walaupun buku Lyotard menjadi acuan kunci postmodern, orang pun sering menghubungkan istilah tersebut dengan teori dekonstruksi Jacques Derrida atau dengan post-strukturalisme Roland Barthes dan Michel Foucault. Ada pula yang menghubungkannya dengan Hermeneutika Gadamer dan Paul Ricour. Terkadang dengan teori semiotika Ferdinand de Saussure yang dipopulerkan oleh Umberto Eco, juga dianggap sebagai paradigma yang menjanjikan. Bahkan akhirakhir ini perspektif holisme yang disebarluaskan Fritjof Capra, David Bohm, Gary Zukav, Whitehead dianggap pula salah satu gejala postmodern, yang terkadang dihubungkan dengan era kebangkitan spiritual dan etis, umumnya istilah itu hendak merumuskan pergerakan paradigma atau transisi ke arah pola berpikir dan pola memandang realitas secara baru yang sementara berlangsung. Dengan kata lain, postmodernisme adalah sebuah gerakan global atas Renaissance; pencerahan atas pencerahan.<sup>8</sup>

Mengapa postmodernisme disebut sebagai sebuah gerakan pencerahan atas pencerahan, oleh karena postmodernisme sangat gigih dalam melakukan kritikan dan gugatan terhadap modernisme yang sangat mendewakan rasio dalam ilmu pengetahuan yang diyakini akan membawa dan mengarahkan manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni manusia bukan lagi sebagai subjek dan pelaku untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi jatuh terperangkap ke dalam objek dan sasaran yang dikendalikan oleh ilmu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 26.

pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Amat tragis dan ironis manusia modernis, Postmodernisme selaku sebuah fase sejarah ingin secara tuntas mengantisipasi dan membebaskan manusia dari segala bentuk cengkeraman zaman yang tak menyenangkan inklusif perbudakan terhadap rasionalitas, bendawi, dan lain-lain. Teori-teori dan pandangan para pemikir yang berkaitan erat dengan postmodernisme seperti yang dikemukakan sebelumnya adalah dekonstruksi, post-strukturalisme, hermeneutika, semiotika, perspektif holisme dan kebangkitan spiritual dan etis. Dekonstruksi adalah sebuah metode dan pendekatan terhadap suatu atau beberapa objek yang telah baku dan beku, oleh karena itu dilakukan suatu teknik pembongkaran terhadap teks-teks yang telah dianggap mapan dan mengalami *status quo* tersebut sehingga menjadi suatu sistem dan tatanan yang baru kembali. Nampak dalam dekonstruksi tersebut sesuatu yang bersifat intoleran, arbitrer dan ambigu (mendua), bahkan seringkali mengejutkan dan menjadi subversif. Secara singkat, dekonstruksi adalah membongkar sesuatu demi perbaikan dan pembaruan agar sesuai dan serasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Post strukturalisme adalah teori dan pandangan yang menolak segala bentuk strukturalisme yang memandang kebenaran itu tunggal yang diproduksi dari suatu mekanisme struktur. Sebuah struktur adalah sebuah bagan logis rasional sehingga tidak dapat melibatkan intuisi ke dalamnya. Sifat kemenyeluruhan (*wholeness*) transformasi dan pengaturan diri (*self regulation*) di mana manusia sebagai salah satu elemennya, maka manusia tidak lagi mempunyai pilihan selain tunduk kepada hukum keseluruhan struktur itu.

Struktur dalam hal ini menjerat kebebasan manusia menurut Michel Foucault, manusia kini telah mati. Manusia menganggap dia merupakan 'Aku', suatu pribadi. Tetapi sebenarnya dia merupakan sekedar titik bahul korelasi-korelasi, yaitu salah satu titik dalam satu kerangka struktur-strukturalisme memandang bahwa struktur seluruh korelasi-korelasi itulah yang penting, bukan manusianya.<sup>9</sup> Post-strukturalisme sebagai anak kandung dari era postmodernisme itu, kini muncul untuk

---

<sup>9</sup> Natsir Mahmud, *Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer*, 32.

memberikan evaluasi kritisnya terhadap modernisme. Hermeneutika merupakan suatu metode tafsir atau interpretasi terhadap objek yang dikehendaki secara kritis dan dinamis dengan pengungkapan epistemologis teks dengan tafsir-tafsirnya yang sering dimutlakkan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penggunaan metode hermeneutika di kalangan pakar Muslim masih terlalu minim atau kurang disebabkan antara lain adalah, masih kuatnya pengaruh nama dan kharismanya ulama-ulama tradisional, yakni ulama-ulama yang cenderung banyak melakukan *ijtihad jama'i* daripada *ijtihad fardi* (individual). Ketimbang dengan pendekatan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh para intelektual Muslim yang paham di bidangnya masing-masing. Di samping itu pula, pakar-pakar dan intelektual Muslim yang telah melakukan *ijtihad fardi* mereka dengan metode hermeneutika masih terhitung dengan jari, misalnya Bassam Tibi, Mahmud Muhammad Toha, Fazlurrahman, M. Arkoun, Abdullahi Ahmad an-Naim, dan lain-lain serta di kalangan Muslimah, antara lain Aisyah Abdurrahman yang lebih dikenal dengan Bintusy-Syathi (berkebangsaan Mesir) dalam karya monumentalnya, *Maqal fi al Insan Dirasah Qur'aniyyah*. Sebagai implikasi dari dekonstruksi, muncul suatu teori atau lambang dan tanda dalam bahasa (semiotika)<sup>11</sup> sebagai suatu alat dan piranti postmodernisme untuk mengukuhkan keabsahannya.

Menurut Derrida, bahwa: tak ada nilai, makna bahkan kebenaran yang dapat dirujuk dari satu teks dengan satu model situasi. Karena apa pun, kebenaran suatu teks tak dapat ditentukan oleh pembacanya, melainkan oleh situasi pembacaannya. Ia baru dianggap benar, jika situasi pembacaan itu memungkinkan lahirnya kebenaran yang meruang dan sewaktu, kondisional dan situasional. Jadi, yang ada hanyalah penafsiran yang memenuhi ekuivalensi dari keberadaan setiap realitas yang tidak selalu sama model situasinya satu sama lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Aisyah Abdurrahman (Bintusy Syathi), *Magal fi al-Insan: Dirasah Qur'aniyyah (Manusia, Sensitivitas Hermeneutika al-Qur'an)*, terj. M. Adib al-Arief (Yogyakarta: LKPSM, 1997), v-vi.

<sup>11</sup> Secara leksikal, semiotika berarti ilmu atau teori tentang lambang dan tanda dalam bahasa; lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 160.

<sup>12</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, 160.

Pengetahuan selalu diperantarai oleh bahasa. Dengan menggunakan metode *language game* (permainan bahasa) dari Wittgenstein, Lyotard menggambarkan fenomena pengetahuan kontemporer. Analisis *language game* adalah membuka perspektif kesadaran dalam menerima realitas plural atau membiarkan bagian di dalam logikanya sendiri. Sebenarnya setiap pengetahuan bergerak dalam *language game*-nya masing-masing. Misalnya dalam permainan catur. Bahwa setiap pion (buah catur) sudah memiliki bahasa dan langkah-langkah tertentu dalam dirinya.

Tentang perspektif holisme, dalam konteks postmodernisme adalah bahwa tak dapat dipungkiri bilamana keberadaan dan dampak postmodernisme telah meluas dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. Memang pada awalnya postmodernisme hanya berkesan dan berpengaruh dari bidang arsitektur, namun dalam tahap-tahap perkembangan berikutnya secara cepat mempengaruhi berbagai aspek dan disiplin ilmu serta dimensi kehidupan manusia seperti di bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, antropologi, psikologi, iptek, hukum, komunikasi/informasi, ideologi, politik, agama, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian multi ragam pendekatan dan cara pandang terhadap trend pemikiran tersebut memiliki kemampuan daya jangkau yang solid dan menyeluruh, yakni perspektif holisme yang merupakan cara pendekatan terhadap suatu masalah, gejala atau suatu masyarakat dengan memandang masalah gejala atau masyarakat itu sebagai suatu kesatuan organis.<sup>13</sup>

Dalam konteks perspektif holisme tersebut, manusia akan mampu memahami dan menyadari bahwa korelasi dan keterkaitan antara satu dengan yang lain merupakan sebuah kepastian, keniscayaan relatif berkembang sesuai realitas dan perkembangan komunitas masyarakat itu sendiri pada suatu kurun masa tertentu. Tentang perspektif kebangkitan agama dan etis dalam era postmodernisme, bahwa masyarakat modern ternyata mulai menyadari adanya kejenuhan yang luar biasa hidup dalam era modern. Modernisme, yang semula menjanjikan kemerdekaan dan pembebasan manusia dari tirani agama, ternyata juga

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 311-312.

telah melakukan distorsi terhadap nilai kemanusiaan yang fitri. Materialisme sebagai anak kandung modernisme, ternyata juga telah menyeret manusia ke lubang nestapa yang amat dalam. Karena seluruh referensi kebenaran telah disatukan dalam ukuran yang materialistik. Seolah-olah manusia dianggap bisa bahagia hanya dengan materi belaka. Padahal hidup manusia sesungguhnya juga ingin digerakkan oleh unsur spiritual.

Bertolak dari hal itu, sebagian masyarakat modern kini telah memasuki satu fase sejarah manusia dan peradabannya, yang secara tentatif disebut fase postmodern. Yakni satu fase dimana secara sederhana dapat dikatakan hendak menarik manusia dari posisi sentral (de-antroposentrisme) melalui pembangkitan dimensi spiritualitas etik. Karena itu, tidak kurang dari Whitehead dan David Bohm menganggap gejala era postmodern adalah era kebangkitan spiritual dan etik.<sup>14</sup> Demikian beberapa uraian tentang latar belakang dan asal usul postmodernisme, baik sebagai sebuah tren dan kecenderungan pemikiran baru di era post-industrial dan globalisasi dewasa ini yang merupakan tahap-tahap sejarah perkembangan umat manusia, maupun postmodernisme sebagai sebuah epistemologis ilmu pengetahuan yang mencakup, meliputi dan mempengaruhi berbagai disiplin dan dimensi kehidupan manusia.

## **Struktur dan Ciri Pemikiran Postmodernisme**

Begitu dahsyatnya arus pemikiran postmodernisme mengalir ke dalam masyarakat, baik melalui media massa cetak misalnya surat kabar, buletin, majalah, jurnal, buku-buku dan lain-lain maupun melalui media elektronika, misalnya radio, TV, fax, internet, VCD, dan lain-lain, semakin menambah cepat tersiarnya pengaruh pemikiran postmodernisme tersebut ke dalam wacana perbincangan masyarakat secara luas. Disamping itu, faktor lain yang ikut mendorong cepat populernya istilah tersebut adalah asumsi dan prediksi sekelompok masyarakat bahwa postmodernisme akan menjadi “antidote’ atau penangkal dan racun yang amat mujarab terhadap kepedihan dari berbagai krisis yang ditimbulkan

---

<sup>14</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, 26.

oleh gelombang pembangunan dan modernisasi di segala lini kehidupan.<sup>15</sup> Dari segi struktur dan bentuknya, postmodernisme terbagi atas dua kelompok besar yaitu: Postmodernisme yang skeptis<sup>16</sup> dan postmodernisme afirmatif. Penggolongan dan klasifikasi tersebut dikemukakan oleh Pauline Marie Rosenau (pemikir berkebangsaan Prancis) penulis buku: *Post-modernism and the Social Science*, yang kemudian dilansir oleh Arief Budiman dari majalah Tempo pada 16 Oktober 1993 yang lalu.

Sebagai inti dari postmodernisme yang skeptis adalah menekankan pada setiap kontradiksi atau pertentangan dalam setiap teori.<sup>17</sup> Dengan metode dekonstruksi, yakni melakukan analisa kritis, mereka menunjukkan adanya pertentangan atau kontradiksi dalam teori apapun, namun tidak memberikan alternatif atau pilihan yang lain dan jalan keluar, sehingga menimbulkan kesan bahwa kelompok postmodernisme skeptis ini cenderung termasuk aliran pemikiran nihilisme sebagai sebuah paham aliran filsafat sosial yang tidak mengalami nilai-nilai etik, moral, sosial dan humanisme, juga segala bentuk kekuasaan pemerintahan, semua orang berhak mengikuti kemauannya sendiri (serba boleh atau permisif).<sup>18</sup>

Postmodernism sebagai gerakan intelektual (*intellectual movement*) mencoba menggugat, bahkan mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern. Pemikiran modern tersebut yang berlandaskan di atas kekuatan rasionalitas manusia memperoleh gugatan dan kritik keras, karena telah menjebak manusia kepada absolutisme. Oleh karenanya, Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa Postmodern merupakan pemberontakan terhadap berbagai bentuk keangkuhan atau arogansi epistemologi yang absolut

---

<sup>15</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, 97.

<sup>16</sup> Skeptis, secara leksikal berasal dari kata skeptical yang berarti (bersifat) ragu-ragu. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), 259.

<sup>17</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmodernism dan Masa Depan Peradaban*, 10-22.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 614.

dan represif.<sup>19</sup>

Seiring dalam bentuknya yang skeptis dekonstruktif tersebut, postmodernism tampil sebagai front perlawanan terhadap berbagai visi modernisme yang mengklaim kebenaran tunggal yang berperan sebagai pusat segalanya. Oleh karena itu, idiom-idiom pluralisme dan relativisme senantiasa menjadi acuan para pendukung postmodernis dalam melakukan dekonstruksi mereka. Berikut dalam bentuknya yang kedua yaitu postmodernisme afirmatif, sesungguhnya tidak seradikal yang pertama yang dikhawatirkan akan berakhir pada nihilisme, akan tetapi lebih bersifat konstruktif dengan membawa visi baru tentang kebenaran. Kebenaran yang tidak lagi dipandang sebagai relatif yang tunggal, tetapi lebih multivarian yang memungkinkan terbukanya dialog epistemologis.<sup>20</sup> Postmodern afirmatif melangkah lebih jauh. Mereka juga tidak percaya pada kebenaran teori yang ada, terutama teori besar. Semakin besar sebuah teori yang kebenarannya mencakup ruang dan waktu yang luas, kian lemah. Oleh karena itu, teori menjadi semakin abstrak dan semakin jauh dari yang ingin di presentasikannya.

Bagi penganut postmodernisme afirmatif, teori kecil lebih dekat dengan yang ingin dipresentasikannya, karena daerah cakupannya yang serba terbatas, maka aliran postmodernisme afirmatif berusaha memperhatikan teori-teori kecil, yang sebelumnya dianggap lemah dan tidak ilmiah. Ini kemudian menimbulkan dialogdialog baru dengan teori yang semula tidak pernah didengarkan. Munculnya wacana tentang feminisme, gender, pengetahuan lokal yang tidak ilmiah, lingkungan hidup, aliran-aliran agama dan kepercayaan dan sebagainya adalah produk dari gerakan postmodernisme afirmatif.<sup>21</sup>

Bila kita membahas dan membicarakan tentang unsur dan ciri pemikiran postmodernisme, maka tidak boleh tidak pasti merujuk dan mengambil referensi pendapat para pakar dan intelektual yang

---

<sup>19</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmoderism dan Masa Depan Peradaban*, 61.

<sup>20</sup> *Ibid.*, vi.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 22.

kompeten, handal dan memiliki reputasi dibidangnya masing-masing. Banyak ahli dan pakar yang telah memberikan kontribusi mereka untuk mempublikasi dan mensosialisasikan ide-ide pemikiran postmodernisme tersebut. Dari berbagai pendapat yang muncul tentang unsur dan ciri pemikiran postmodernisme tersebut terdapat beragam pendapat para ahli yang dapat dipertimbangkan, merupakan komparasi atau perbandingan antara satu dengan yang lainnya dan bahkan mungkin untuk menguatkan pendapat yang satu atau yang lainnya atau saling mendukung. Dalam konteks tersebut, menurut hemat penulis sedikitnya lima faktor yang termasuk ke dalam unsur dan ciri pemikiran postmodernisme yang akan diuraikan berikut ini yang akan secara langsung dapat menerangkan fenomena alur pemikir postmodernisme, walaupun masih banyak ciri dan fenomena lain yang mungkin lebih patut untuk dipertimbangkan.

Adapun kelima ciri dasar unsur atau yang penulis istilahkan struktur unsur pemikiran postmodernisme adalah dekonstruksi, relativisme, pluralisme, ilmu tidak netral, dan pencarian makna-makna (implikasi spiritualistik).

## **Dekonstruksi**

Hampir seluruh konstruksi atau bangunan dasar keilmuan (epistemologi) dalam era modern yang telah mapan, baik dalam bidang sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, bahkan dalam disiplin ilmu-ilmu kealaman (biologi, fisika, dan lain-lain) yang telah berlaku standar (baku) selama ini yang sering disebut *grand theory* dipertanyakan kembali oleh postmodernisme.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa teori-teori ilmu sosial modern mengandalkan adanya struktur dan konstruksi baku yang dapat dibangun secara kokoh dan berlaku secara universal, sebagai *grand theory* seolah semua orang percaya akan kekuatan dan keampuhannya. Dengan *grand theory*, berbagai fenomena sosial dimanapun dengan mudah diungkapkan. Meskipun konstruksi yang demikian itu cukup membantu untuk memahami problema sosial kemasyarakatan, tetapi konstruksi baku

seperti itu dianggap terlalu skematis dan terlalu menyederhanakan masalah. Dominasi teori-teori besar tidak memberikan peluang untuk munculnya teori-teori baru yang mungkin jauh lebih baik dan efektif dalam memecahkan persoalan. Pernyataan adanya metodologi yang standar, baku dan tidak dapat diganggu gugat, yang demikian itulah ditenang oleh kaum postmodernis.<sup>22</sup>

Konstruksi atau bangunan keilmuan dan epistemologi ilmu pengetahuan yang dengan susah payah telah dibangun oleh para ilmuan di era modernisme atau post enlightenmen (pencerahan) ingin diubah, diperbaiki dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernis. Upaya-upaya seperti itu, dengan sedikit bebas penulis sebut dengan istilah, dekonstruksionisme yaitu mempertanyakan ulang, membongkar adagium-adagium yang telah mapan, standar yang dibangun oleh pola fikir modernisme, untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat untuk memahami realitas sosial, keberagaman dan alam berkembang dewasa ini jauh dari masa sewaktu teori-teori yang baku tersebut dibangun.

Di era postmodernisme tidak ada lagi konstruksi tetapi dekonstruksi, tidak ada sentralisasi tetapi desentralisasi terjadi penyebaran-penyebaran. Atau, menurut Lyotard tidak ada lagi homologi (sistem tunggal), tetapi paralogi (sistem plural). “Cerita besar” sebagai grand narasi yang menjadi metanarasi murni pudar digantikan oleh narasi-narasi lokal. Dengan demikian, kebenaran menjadi kontekstual, lokal dan historik.<sup>23</sup> Dengan dekonstruksi ini, membuat kita berpikir mendasar tentang segala hal yang selama ini kita anggap sudah pasti. Juga membuat kita peka terhadap pendapat lain yang selama ini kurang kita perhatikan. Memacu sikap kritis demokratis dan rendah hati. Kepastian teori besar seperti kapitalisme dan sosialisme perlu di pertanyakan kembali. Bersamaan dengan itu, kita bisa lebih simpatik mendengarkan suara-suara baru seperti suara dari kelompok feminis, suara orang-orang di dunia ketiga (berkembang), suara orang-orang tertindas dan lemah (*mustadh'afin*), dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, 99.

<sup>23</sup> Natsir Mahmud, *Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer*, 35.

## Relativisme

Sebagai unsur dan ciri asas yang kedua dari aliran pemikiran postmodernisme adalah relativisme yang mengandung makna bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Relativisme merupakan implikasi dari penolakan postmodernisme terhadap absolutisme ilmu pengetahuan modern yang beranggapan bahwa segala sesuatunya melalui penggunaan rasionalitas manusia secara optimal, oleh karena itu, akal budi manusia menjadi pusat atau sentrum dari keseluruhan aktivitas dan orientasi yang diprogramkannya. Dalam konteks tersebut, postmodernisme tampil menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang konstan dan stabil, karena stabilitas bermakna, statis dan mandeg. Kebenaran terpecah menjadi majemuk karena selalu berada dalam ruang waktu dan konteks yang berpengaruh terhadap kebenaran itu. Pemikiran yang relevan dalam hal ini adalah fenomenologi transendental dari Husserl yang menyatakan bahwa “*to exist does not mean the same thing in every region*” (untuk berada tidak berarti sesuatu itu sama dalam setiap wilayah).<sup>24</sup>

Dengan demikian, kebenaran selalu berada dalam wilayah tertentu. Atau, menurut Lyotard, pengetahuan manusia terlokasikan sehingga tidak tunggal dan tidak universal lagi. Terpecahnya kebenaran dalam kemajemukan bukan saja disebabkan oleh wilayah atau kawasan tetapi juga oleh pecahnya akal dan subjek manusia. Muldon menjelaskan, “*The Postmodern moment has been characterized as a kind of explosion of the modern episteme in which reason and its subject-as the source of “unity” and of “whole are blown to pieces.*”<sup>25</sup> (Gerakan postmodern dicirikan oleh semacam ledakan epistemologi modern dimana akal dan subjeknya sebagai sumber kesatuan dan keseluruhan terpecah dalam potongan-potongan). Subjek-cogito dalam rasionalisme Descartes yang dipandang sebagai relatif otonom, konstan dan mutlak, dalam pandangan postmodernisme tidak lagi dipandang otonom dan mutlak. Subjek-Cogito sudah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>25</sup> Mark S. Muldon, “Henri Bergson and Postmodernism,” dalam *Philosophy Today*. Vol. 2.

harus “mencair” dengan realitas dunia di luar dirinya, sehingga tiada tanpa dunia dan dunia tiada tanpa ia.<sup>26</sup>

## Pluralisme

Merupakan ciri dan unsur mendasar yang ketiga dari postmodernisme adalah pluralisme. Pluralisme secara leksikal berarti hal yang mengatakan jamak atau tidak satu.<sup>27</sup> Dalam sebuah contoh dapat diungkapkan, bahwa saat ini merupakan era pluralisme agama, era pluralisme teknologi, dan sebagainya. Dibalik ungkapan itu, terkandung maksud bahwasanya amat sulit untuk mempertahankan. “Paradigma tunggal” dalam diskursus apapun. Semuanya serba beraneka ragam, semuanya serba perlu difahami dan didekati dengan berbagai ragam pendekatan (*multidimensional approaches*).

Lihatlah berbagai gejala atau fenomena yang ada di depan kita. Misalnya budaya, agama, ekonomi, sosial, keluarga, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya; semuanya menunjukkan wajah yang pluralistik (majemuk). Dalam hubungan ini, “paradigma tunggal” yang dipergunakan oleh peradaban Barat, baik dalam segi keilmuan maupun yang lainnya telah dipertanyakan validitasnya oleh pemangku budaya-budaya non modern (*post enlightenment*). Telaah tajam Edward Said tentang dominasi paradigma tunggal Eropa mulai dipertimbangkan oleh para ilmuwan sosial dan keagamaan.<sup>28</sup>

Era pluralitas sesungguhnya, telah ada dan berkembang sejak dahulu kala sampai dewasa ini. Namun, penghayatan, kesadaran dan visi manusia sekarang jauh lebih maju dan berkembang. Salah satu faktor penentu perkembangan yang amat maju itu adalah disebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi.

---

<sup>26</sup> Natsir Mahmud, *Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer*, 34-35.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 691.

<sup>28</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, 105.

## Ilmu Tidak Netral

Kecenderungan postmodernisme kepada pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan selalu memihak pada nilai, sarat nilai (*value-bound*). Pernyataan tersebut adalah sesuai dengan pendapat Jurgen Habermas filsuf berkebangsaan Jerman tokoh mazhab Frankfurt aliran kritik sosial. Menurut beliau, bahwa ilmu pengetahuan, tidak bebas nilai, karena setiap produk ilmu terlebih dahulu ditentukan secara normatif. Oleh sebab, ilmu pengetahuan selalu memiliki pretensi-pretensi yang dengan sendirinya tidak netral. Tak ada fakta yang ditangkap benar-benar orisinal, tetapi selalu dibungkus dalam '*vested interest*', oleh pengamat fakta itu.<sup>29</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dengan melihat kenyataan, bahwa hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipergunakan untuk kebaikan atau kejahatan (bebas nilai), maka pandangan Habermas di atas, mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai pihak.

Menurut hemat kami, bahwa ilmu-ilmu alam dan eksakta adalah bebas nilai, karena alam dan eksakta adalah benda mati bisa digunakan untuk apa saja, untuk kebaikan ataupun kejahatan. Sedangkan ilmu-ilmu sosial bisa bebas nilai bisa juga terikat nilai tergantung pada metode pendekatannya. Bila kita menggunakan pendekatan positivistik akan menghasilkan ilmu bebas nilai, karena dalam pendekatan ini lebih melihat hubungan kausalitas suatu fakta, kemudian melakukan kuantifikasi. Bila menggunakan pendekatan fenomenologi transendental akan menghasilkan ilmu padat nilai. Karena fenomenologi melakukan pemaknaan-npemaknaan atas fakta. Pemahaman dapat lahir dari *wel-tanschaung*, pandangan filosofis atau keagamaan.

Sedangkan ilmu-ilmu humaniora seperti; seni, sastra, etika, teologi, filsafat, agama dan politik secara substansial mengandung nilai-nilai tertentu sehingga bisa netral bila dikaji secara deskriptif murni dan bisa tidak netral bila diarahkan kepada misi tertentu. Jadi, pernyataan

---

<sup>29</sup> Frans Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 200-201.

dikalangan modernis bahwa ilmu bebas nilai masih menghadapi berbagai kritik dan kecaman dari berbagai pihak.<sup>30</sup>

## **Pencarian Makna-makna: Implikasi Spiritualistik**

Salah satu lagi ciri postmodernisme adalah tidak menjadikan rasio sebagai hakim segalanya. Rasio hanya salah satu tangga kebenaran sesudah empiri. Kebenaran tertinggi ditangkap secara intuitif. Demikian pendapat seorang tokoh postmodernis, Henry Bergson. Intuisi menangkap makna-makna dunia yang tidak ditangkap oleh rasio kuantitatif dan eksak. Intuisi menangkap kualitas-kualitas hidup. Intuisi memberontak terhadap tuntutan yang memenjara dan mematikan kehidupan.

Dalam strukturalisme, manusia berpikir, bersikap dan berkelakuan sesuai apa yang didiktekan oleh struktur terhadapnya. Manusia akhirnya hidup dalam kejenuhan, rutinitas yang disajikan oleh struktur menyebabkan manusia menjadi robot hampa, tidak bermakna. Tesis tersebut di atas, mengimplikasikan lahirnya kecenderungan spiritualisme. Spiritual di Barat telah muncul selama berabad-abad, antara lain dari pemikiran Pascal dan Montaigne di abad ke-16/17. Di awal abad ke-20 dikembangkan kembali oleh sejumlah pemikir: Octave Hamelin Lavelle dan La Senne dan berbagai tokoh lainnya. Spiritualism mereka ini mengakui realitas benda material, tetapi dalam taraf rendah. Roh merupakan tujuan tertinggi spiritualisme dengan konsep ontologi semacam itu tertekan oleh kemajuan modernisme.

Akan tetapi, kini muncul lagi kecenderungan spiritualisme itu. Dalam tampilannya pada masyarakat Barat, muncul spiritualisme tanpa ikatan agama (spiritualisme *without organized religion*) yang hanya diajarkan pada pandangan filosofis Jefferson dan Naisbitt. Aburdene melihat peranan agama formal akan menurun dan digantikan oleh spiritualisme. Dengan demikian, akan muncul manusia “tak beragama” tetapi “berkerohanian”. Sayyed Hossein Nasr sebaliknya melihat, bahwa spiritualitas tanpa agama adalah utopis. Ia melihat bahwa spiritualitas yang didomi-

---

<sup>30</sup> Natsir Mahmud, *Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer*, 39.

nasi oleh agama di masa lalu akan tampil di masa akan datang. Jadi, agama masa akan datang adalah agama masa lalu dan masa kini.<sup>31</sup> Islam sebagai ajaran agama yang mengajarkan keseimbangan dan keserasian hidup, baik material maupun spritual akan menjadi harapan dan dam-baan umat manusia di masa depan secara sempurna.

## Penutup: Sebuah Refleksi

Faktor-faktor positif dari pemikiran postmodernisme dan akibat langsung yang ditimbulkannya dalam kehidupan keseharian dapat dike-mukakan berikut ini berdasarkan berbagai pendapat dalam penelitian yang dilakukan oleh para pakar antara lain:

*Pertama*, bahwasanya postmodernisme amat menentang terhadap pendewaan rasio. Oleh sebab itu, postmodernisme ingin kembali meng-gali tradisi dan adat istiadat lama yang mengembangkan sisi lain dari kerohanian manusia yaitu potensi intuitif dalam kegiatan hidup manusia. Banyak nilai-nilai lain yang dapat memberikan makna hidup selain yang rasional. Dalam hal ini ada kawasan rasional dan trans rasional yang perlu diresapi dan ditelusuri untuk bisa memberikan nafas baru dalam peradaban umat manusia. Munculnya kecenderungan di barat masa ini merupakan fenomena postmodernisme yang perlu disambut dengan tawaran nilai spiritual keagamaan. Kecenderungan semacam inilah yang oleh Naisbitt dan Aburdene dalam bukunya *Megatrend 2000, Ten New Directions for The 1990* disebut sebagai gejala kebangkitan agama (*religious revival*) sementara Whitehead dan David Bohm menyebutkannya sebagai era “kebangkitan spiritual dan etik”.<sup>32</sup>

*Kedua*, postmodernisme ingin melihat agama benar-benar mem-bumi. Sehingga diperlukan pemikiran keagamaan. Jika visi ini diterima oleh Islam, maka kegiatannya akan nampak dalam mengintensifkan sumber daya manusia secara kualitatif. Materi-materi ilmu pengetahuan yang Qur’ani, selain ilmu akidah dan ibadah tidak dipertentangkan lagi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>32</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmoderism dan Masa Depan Peradaban*, 159.

secara dikotomis dengan apa yang disebut dengan ilmu umum. Di dalam Q.S. al-Fathir ayat 27-28, misalnya, menunjukkan bahwa indikator ulama yaitu orang-orang yang mendalami rahasia ilmu, tentang air yang turun dari langit, tentang buah yang ditumbuhkan, tentang gunung dan cahaya bias di samping cahaya hitam putih, tentang manusia, tentang ternak dan binatang melata, kesemuanya itu merupakan isyarat dari Allah untuk dipelajari dan diteliti.<sup>33</sup>

Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.<sup>34</sup>

Dari sinilah akan lahir ilmu-ilmu alam, kimia, hukum, ilmu hitung, ilmu sosial dan lain-lain.<sup>35</sup> Dilihat dari fenomena sosial tentang konsep postmodernisme di bidang ini, maka umat Islam masih perlu mengejar ketertinggalannya dari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah pernah diteliti oleh para ilmuan Barat atau non Muslim. Postmodernisme secara sadar mendukung faham relativisme dan pluralisme, yaitu pandangan bahwa kebenaran itu relatif dan beragam. Setiap bangsa masyarakat, dan kelompok memiliki standar kebenaran sendiri khususnya dalam bidang etika dan budaya. Dengan meminjam istilah Wittgenstein, setiap kelompok sosial memiliki *'language game'*

---

<sup>33</sup> Andi Rasdianah, "Syariat dan Spiritualitas Islam Pada Era Postmodernisme," 11.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), 699-700.

<sup>35</sup> Rachmat Djatnika, *Islam dan Kehidupan Masyarakat: Antara Ajaran dan Praktik Kehidupan Muslim: Tinjauan Fenomena Sosial dalam Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Suka Press, 1993), 354-355.

sendiri, yang belum tentu cocok dan berlaku bagi kelompok lain. Dengan demikian, faham relativisme dan pluralisme merupakan ciri postmodernisme, sementara filsafat hermeneutika dianggap sebagai metode yang paling pas untuk memahami dan mengembangkan faham postmodernisme. Sikap dialogis, empati, dan toleran yang dikembangkan oleh pendukung postmodernisme barangkali merupakan salah satu akibat dari perkembangan dunia informatika, salah satu ciri menonjol dari era postmodernisme, sehingga masyarakat dunia semakin dibuat sadar akan pluralitas dan hak masing-masing kelompok budaya dan agama yang ada. Sebagai hakikat dasar. Postmodernisme amat menghargai segala perbedaan serta membiarkan segala teori terbuka (transparan). Yang lebih penting adalah bukan mana yang lebih benar, namun kepekaan pada pendapat orang lain kemudian secara bersama-sama mencari sintesisnya. Sebagai semangat zaman, postmodernisme dapat diartikan sebagai keterbukaan untuk melihat nilai dari hal-hal yang baru, berbeda dan lain, sambil menoleh kecenderungan dogmatis dan ketaatan pada suatu otoritas, tatanan atau kaidah baru. Sehingga semakin menyadari bahwa kebenaran memang terlalu besar untuk dimonopoli oleh satu sistem saja dan bahwa keragaman pandangan itu lebih indah dari pada keseragaman yang meskipun membaca kekompakan, sering membelenggu kebebasan manusia, bahkan mengeksploitasinya. Singkat kata, postmodernisme memberikan nuansa baru yang menyegarkan dan membebaskan manusia dari berbagai belenggu dan jeratan formalisme-teoritis kaum modernis.

Kemudian, dengan metode dan logika, dekonstruksi. Postmodernisme melakukan upaya terobosan-terobosan baru terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia dalam konteks bagaimana relasi dan interaksi manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan kosmos secara universal. Pemahaman tentang Tuhan dan berbagai pesannya adalah tetap pada batas relativisme dan aproksimasi (*dzan*). Sikap yang serba mutlak dan kemudian dengan mengatasnamakan kebenaran absolut lalu memaksa orang lain untuk tunduk haruslah didekonstruksi dan direlativisir. Kebebasan bagi semua orang dan komunitas menciptakan language game sendiri untuk membangun epistemologi kehidupan

menurut cara dan pengalamannya serta pilihan hidupnya sendiri. Dalam hal ini, yang harus dilakukan oleh para intelektual dan kalangan agamawan adalah melakukan penyandaran kritis agar seseorang akhirnya secara otentik menentukan pilihannya bebas dari berbagai dominasi. Iman yang asli adalah pilihan iman yang otonom, bukan heteronom. Bukankah jika kita yakin bahwa manusia selalu cenderung kepada kebenaran yang pada akhirnya sebuah kebenaran itu akan menjadi pilihan sejarah kemanusiaan? Dekonstruksi merupakan ajang yang sangat positif dan penuh dinamika dalam upaya bersama kita membangun sikap kritis dan saling mencintai di antara sesama, demi terwujudnya *civil society* yang bermartabat.<sup>36</sup>

Uraian berikut adalah berupa gambaran secara singkat faktor negatif pemikiran postmodernisme dan berbagai upaya kita untuk mengantisipasi-pasinya. Dalam menatap era Millenium III, umat Islam perlu membuat strategi dan taktik perjuangan yang bermakna di zamannya dengan tidak meninggalkan komitmen pada prinsip-prinsip Islam. Era Millenium III pada awalnya lebih diwarnai oleh Postmodernisme yang mengedepankan aspek-aspek antara lain humanis dan pluralis akan dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam memang perlu faham adanya rasa kemanusiaan, namun tidak boleh menjadikan humanisme sebagai ideologinya.

Demikian pula kita fahami juga adanya kehidupan masyarakat yang plural, namun kita tidak akan berfaham kepada Pluralisme. Mengapa? Bila berideologi pada Humanisme berarti meninggalkan Islam dan mendewakan kemanusiaan, dan bila berideologi pada pluralisme berarti mendewakan kemajemukan serta menganggap semua agama itu benar, ini jelas mengingkari akidah Islam. Oleh karena itu, pandangan kita mengenai alam fikiran humanis dan pluralis tetap berdasarkan persepsi dan akidah keyakinan Islam kita, sebagai seorang manusia kita punya rasa humanis (kemanusiaan), rasa kemanusiaan itu kita ujudkan dengan berbagai aktivitas yang ditentukan oleh Islam untuk kerahmatan atau kesejahteraan hidup umat manusia, saling tolong menolong, menolak segala bentuk kezaliman, ketidakadilan sesama umat manusia dan

---

<sup>36</sup> Suyoto & Syamsul Arifin (ed.), *Postmoderism dan Masa Depan Peradaban*, 63.

sebagainya. Demikian pula dengan kita memahami situasi yang plural (majemuk) dalam masyarakat, dalam hal ini justru perlu dicermati lebih dalam sehingga langkah-langkah dan strategi umat Islam dapat tepat mengenai sasaran, yang lebih lanjut tercapai tujuannya.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Aisyah (Bintusy Syathi). *Magal fi al-Insan: Dirasah Qur'aniyyah (Manusia, Sensitivitas Hermeneutika al-Qur'an)*, terj. M. Adib al-Arief. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
- Gellner, Ernest. *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*. terj. Ilyas Hasan. Jakarta: Mizan, 1995.
- Suseno, Frans Magnis. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Echols, John M. & Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Muldon, Mark S. "Henri Bergson and Postmodernism." *Philosophy Today*. Vol. 2.
- Djatnika, Rachmat. *Islam dan Kehidupan Masyarakat: Antara Ajaran dan Praktik Kehidupan Muslim: Tinjauan Fenomena Sosial dalam Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Suka Press, 1993.
- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mahmud, Natsir. *Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer*. Makassar: PPIM IAIN Alauddin, 2002.
- Suyoto & Syamsul Arifin (ed.). *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

al-Qardhawi, Yusuf. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*.

terj. Bustami A Gani, dkk. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.



# Menatap Reformasi Pendidikan Nasional

**Muhammad Rais**

STAIN Sorong Papua Barat

**Abstract:** *There are at least three factors that caused weaknesses of national education system: First, the education system is rigid and centralized. Second, the national education system does not ever consider the fact that there are in the community and addressing the people as mere objects of education. Third is the education bureaucracy system. At the same time, the mentality of universities should be improved. Universities should uphold academic integrity and ethics, including the freedom of academic forum and not be a rubber stamp for the legalization of injustice. Responsibility as a group of academic functioning and social agent of change of control should be actually enforced. The research conducted is above the rules of science, not on the basis of corruption in order to get funding. Colleges are educational institutions, research and public service that should be able to act in an objective and independent and always uphold the integrity of academic ethics. Academic autonomy should be embedded in each college to establish the truth (conscience), which in turn can improve intelligence, readiness of qualified human resources, and public welfare.*

**Keywords:** *Local Wisdom, Manifesto of Reform of the Education and Higher Education.*

## Pendahuluan

Terdapat enam alasan yang menjadikan judul ini dipandang strategis. *Pertama*, bangsa Indonesia telah mengalami babak perkembangan yang dipengaruhi oleh kehidupan global dan dikenal dengan era informasi. Era ini mengubah tatanan yang sudah “mapan” pada era sebelumnya yakni era agraris dan industri. Era informasi memiliki karakter yang berbeda dengan era sebelumnya. Salah satu karakter era informasi ini adalah lahirnya kebutuhan dasar yang baru yaitu kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur informasi.<sup>1</sup> Informasi sangat mudah diperoleh termasuk di dalamnya informasi berkaitan dengan pendidikan.

*Kedua*, dari sisi mentalitas, tampaknya, bangsa Indonesia masih perlu dipertanyakan dan didiskusikan lebih jauh, apakah bangsa ini telah memiliki mental sebagai masyarakat Informasi atau bangsa ini dalam era informasi tetapi masih bermental agraris. *Ketiga*, bersamaan era informasi bangsa ini memasuki era reformasi. Era ini membawa perubahan yang sangat drastis pada atmosfer politik bangsa ini pada satu sisi tumbuh dan berkembangnya paham kebebasan berpendapat yang jauh berbeda dengan era sebelumnya. Era reformasi ini dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan era demokrasi yang oleh cendekiawan dipandang bersumber dari dunia Barat.

*Keempat*, ormas Islam secara realitas telah mengembangkan berbagai aktivitas yang dipandang berperan dalam pembinaan umat, dan seberapa besar kesiapan ormas Islam dalam mengantar jamaahnya memasuki sebuah perubahan. Hal ini merupakan tantangan internal ormas Islam. *Kelima*, lagi-lagi pertanyaan yang perlu dikemukakan apakah dengan kebebasan yang berkembang selama ini yang merupakan imbas dari pen-

---

<sup>1</sup> Era agraris dan industri merupakan dua era yang dialami bangsa Indonesia sebelum lahirnya era informasi. Karakteristik era agraris adalah ketergantungan masyarakat terhadap alam sangat besar. Sedang era industri, membangun hubungan antara majikan (pemilik modal) dan pekerja (karyawan), produsen dan konsumen. Dari sisi hubungan sosial, masyarakat cenderung melihat dari sisi transaksional pertimbangan aspek kebutuhan masing-masing pihak.

garuh global sudah sejalan dengan mentalitas bangsa Indonesia, atau hanya bangsa ini memasuki era dimaksud dengan tidak didukung oleh mentalitas masyarakat reformasi dan informasi. Keenam, oleh sebahagian ahli berpendapat bahwa wacana pendidikan karakter merupakan “tindakan operasi kesehatan” bagi kemerosotan moral yang melanda bangsa Indonesia. Menurut Nurhikmah, pendidikan karakter merupakan “jalan keluar” atas berbagai krisis yang melanda bangsa ini.<sup>2</sup> Berkaitan dengan pembangunan mentalitas ini, maka dalam era informasi ini kita disuguhkan istilah baru yang berkaitan dengan pembangunan mental bangsa ini yakni pembangunan karakter.

Pembangunan karakter sebagai isu nasional, perlu didiskusikan lebih jauh baik konsep yang dikandungnya maupun urgensinya terutama sebagai umat Islam yang hidup berdampingan dengan penganut agama lain dalam sebuah bangunan besar yang dikenal dengan Indonesia dalam sebuah era baru yang dikenal dengan era informasi. Berbagai pihak berpengaruh dalam perubahan masyarakat dan tentu saja berpengaruh pula dalam pembentukan karakter bangsa antara lain yaitu: pemerintah, lembaga politik, lembaga keagamaan dan pendidikan, maka urgensi forum ini semakin tampak. NU sebagai ormas Islam, dengan tema ini tampaknya menginginkan adanya landasan terkait dengan pembangunan karakter bangsa dan, tentu saja, hal ini merupakan salah satu kontribusi NU yang prestisius dalam era informasi untuk bidang peradaban. Secara umum makalah ini melihat dari sisi pencarian konsep mengenai landasan pembangunan karakter bangsa Indonesia untuk umat Islam.

## **Konseptualisasi Gagasan Karakter Bangsa**

Terhadap setiap gagasan atau isu serta kebijakan, maka salah satu hal yang perlu dikemukakan adalah pertanyaan mendasar yaitu apakah

---

<sup>2</sup> Nurhikmah, "Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Karakter," *Makalah*, dalam Seminar Nasional Berwawasan Kebangsaan dan Kampanye Pendidikan Karakter bagi Pelajar SMA oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pemuda Indonesia (LP3I) Kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Makassar, pada 12 Mei 2012, 3.

filosofi dan makna serta mengapa isu tersebut dikemukakan. Istilah karakter mengemuka dalam pemerintahan SBY Jilid II, yang sering didengar pada berbagai pidato beliau. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan istilah ini cukup populer dan tahun 2011 dijadikan sebagai tema hari pendidikan nasional. Karakter menurut bahasa berkaitan dengan perilaku. Menurut Mansyur Ramli bahwa “dilihat dari sisi kurikulum seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan lainnya. Semuanya mengandung muatan pembangunan karakter”.<sup>3</sup> Bagaimana arah pembangunan karakter, dia mengatakan “dengan membandingkan perilaku siswi di Cina, Korea dan Singapura, menurutnya tidak ada pelajaran budi pekerti, akhlak dan agama, tetapi coba lihat di sekolah. Tatakramanya begitu luhur. Mereka bisa saling menghargai dengan kultur yang beragam. Bisa hidup bersama, Itu sebabnya salah satu tujuan pendidikan itu disebutkan *learning to life together*, bagaimana bisa hidup bersama”.<sup>4</sup>

Pandangan Mansyur Ramli di atas menunjukkan bahwa dari sisi kurikulum tampaknya pendidikan karakter tercakup dalam setiap mata pelajaran. Karena itu tampaknya tidak perlu ada pelajaran tambahan yang diajarkan secara khusus. Pelajaran yang lain merupakan sumber informasi mengenai pendidikan karakter. Untuk materi atau isi pendidikan karakter lebih kepada pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian yang dimaksud sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yakni hidup berdampingan dengan orang lain. Karenanya, untuk perilaku hidup berdampingan dengan orang lain, dilihat dari sisi kompetensi yang ingin dibangun dalam kurikulum merupakan kompetensi sosial. Bagaimana makna filosofi karakter. Menurut Wynne seperti dinyatakan oleh Nurhikmah, bahwa ia berasal dari Yunani yang berarti *to mark* (menandai) dan fokus pada upaya mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.<sup>5</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa*

---

<sup>3</sup> Mansyur Ramli, “Kembali Fokus Ke Pembangunan Karakter,” *Harian Fajar*, 2 Mei 2011, 28.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nurhikmah, *Membangun Wawasan Kebangsaan*, 4.

*Indonesia* disebutkan bahwa sifat-sifat kejiwaan, watak, akhlak atau budi pekerti atau kepribadian.<sup>6</sup> Pandangan yang lain dikemukakan oleh Jakoep Ezra dalam Nurhikmah bahwa merupakan kekuatan untuk bertahan hidup di masa sulit.<sup>7</sup>

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan di atas berkaitan dengan makna karakter, ditemukan bahwa dari sisi istilah ia direlevansikan dengan akhlak. Sedang dari sisi fungsionalnya ia mempunyai makna sebagai sebuah energi yang dapat mendorong seseorang untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaanya dalam keadaan sulit, sebagaimana yang dapat dipahami dari pandangan Jakoef Ezra di atas.

## Tantangan Masyarakat Informasi Indonesia

Sebelum membicarakan tantangan masyarakat informasi, terlebih dahulu dikemukakan pengalaman bangsa Indonesia dalam memasuki berbagai era kehidupan yang pernah dilaluinya. Indonesia sejak kemerdekaan 1945 paling tidak empat era kehidupan telah dilalui dan keempat era ini memiliki karakteristik yang berbeda. *Pertama*, era pertanian. Pada era ini hubungan antarindividu sangat tajam dan hubungan antar person sebatas pada kawasan tetangga dan sedaerah. *Kedua*, era industri. Pada era ini hubungan majikan dan buruh merupakan faktor yang berpengaruh. Dilihat dari sisi pemanfaatan barang dan jasa tampaknya terutama bagi umat Islam hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, dan kebanyakan umat Islam belum menikmati era ini karena faktor keterbatasan. Dalam era ini bagaimanapun juga umat Islam lebih banyak menjadi bagian dari pekerja dibanding sebagai majikan. *Ketiga*, era informasi. Era ini ditandai dengan terjadinya ledakan informasi dengan melimpahnya fasilitas informasi dengan harga yang dapat dijangkau. Selain itu persaingan pasar dan produk merupakan anak kandung era ini. *Keempat*, era reformasi. Era ini merupakan babak baru, khususnya

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 189.

<sup>7</sup> Nurhikmah, *Membangun Wawasan Kebangsaan*, 5.

bagi kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia. Semangat yang dibangun oleh era ini adalah kebebasan berpendapat. Suatu hal yang perlu dikemukakan bahwa era reformasi bersamaan dengan era informasi sehingga dalam kondisi seperti ini kiranya bangsa kita telah memiliki beban ganda dalam melakukan penyesuaian karakteristik tuntutan era dimaksud (informasi dan reformasi) dengan kesiapan mental mereka.

Memperhatikan karakteristik keempat era tersebut bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam, tampaknya pola hubungan antar-person telah mengalami perubahan yang dahsyat pada era ketiga dan keempat. Pada era ini, hubungan antar personal tidak lagi terhalangi ruang dan waktu bahkan dalam hubungan antarumat beragama sekalipun. Bersamaan dengan itu, kebutuhan terhadap teknologi sebagai jasa yang menyertai pemenuhan kebutuhan umat Islam sangat terasa. Selain itu tingkat ketergantungan antarsesama dalam satu dunia yang sama bagi penduduk yang “berbeda” merupakan suatu keniscayaan.

Perubahan karakteristik pada era ini, memberikan pandangan bahwa kebutuhan masyarakat informasi memiliki perbedaan dengan masyarakat yang dibangun oleh sebelumnya. Salah satu kebutuhan yang sangat strategis pada era ini adalah pengembangan daya kritis masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat mengembangkan daya kritis maka akan mengakibatkan masyarakat menjadi korban informasi.

## **Landasan Pembangunan Karakter**

Kata *landasan* berasal dari *landas* yang mengandung arti *tumpuan*.<sup>8</sup> Secara fungsional landasan diartikan sebagai penahan, tempat memulai, mendasari sesuatu atau mewarnai. Dengan fungsi ini maka landasan terhadap sesuatu sangat penting untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, maka ditemukan tiga landasan yaitu:

---

<sup>8</sup> Anton, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 633

## 1. Aspek Kebangsaan

Secara geografis berada di Indonesia, berbagai peraturan perundangan-undangan menjadi bagian umat Islam untuk mentaatinya. Umat Islam berkontribusi besar bagi lahirnya bangsa ini. UUD 1945 juga memberikan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Kekuatan pemerintah yang bersumber dari pengembangan amanah konstitusi dan respons atas dinamika masyarakat, harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat secara luas.

Dalam Islam, kehadiran suatu tatanan pemerintahan yang pro kepada kepentingan rakyat telah menjadi bahan kajian oleh ulama. Oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa terdapat dua tipe manusia dalam memimpin peperangan. Tipe pertama adalah *Qawiyyun fajir* (seorang yang kuat lagi tidak bermoral) dan tipe yang kedua *shalihun dhaif* (seorang yang shaleh tapi lemah). Dua tipe ini ditanya kepada imam Ahmad, lalu sang Imam memberi jawaban bahwa tipe yang pertama, diharapkan kekuatannya akan berguna bagi umat Islam, sedang tipe yang kedua maka kesalahannya hanya untuk dirinya dan kelemahannya akan berimbas pada umat Islam.<sup>9</sup>

Pandangan ini memberikan pemahaman pertama antara lain: *Pertama*, persoalan kepemimpinan dalam Islam merupakan salah satu instrument penting dalam menjalankan ajaran agama Islam dan dalam konteks lebih luas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. *Kedua*, pemimpin sebagai pengendali sumber daya, harus memiliki kemampuan yang lebih dibanding oleh masyarakat yang dipimpinnya. Syarat-syarat minimal atau tipologi pemimpin yang ditawarkan oleh Imam Ahmad adalah tipologi yang minimal. *Ketiga*, dampak sebuah kepemimpinan, dalam berbagai tipologi kiranya diarahkan untuk kepentingan umat Islam dan kejayaan Islam. *Keempat*, Imam Ahmad mengakui mengakui secara implisit tentang terjadinya dinamika dalam kehidupan sosial. Hemat penulis, bagi umat Islam Indonesia aspek kebangsaan ini merupakan

---

<sup>9</sup> Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taemiyah, "Assiyasah Asy-Syar'iyah," dalam program *Maktabah Asy-Syamillah*, 9.

hal yang mendasar dalam menata kehidupan Islam di Indonesia. Selain karena umat Islam dengan menganut paham ini juga secara realitas telah memiliki modal politik dan sosial, juga dengan aspek pengembangan ini maka Islam diharapkan memberikan dampak positif bagi pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi oleh ormas Islam terbesar ini menganggap bahwa paham kebangsaan ini merupakan hal yang mendasar dan menjadi bingkai dalam membangun kebersamaan, seperti yang dikemukakan pada pandangan KH. Hasyim Asy'ari mengenai kebersamaan dalam *Muqaddimah Qanun Asasi NU*.

## 2. Aspek Keislaman

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad dalam konteks kerasulan diberikan beban untuk mengembangkan (perilaku yang sesuai dengan) nilai-nilai *rahmatan lil alamin*, sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiya: 107, "*Wa ma arsalnaka illa rahmatil lil 'alamin*." Beban ini dipahami sebagai sebuah tugas kerasulan yang dalam bahasa sekarang bisa dikenal dengan visi besar Islam. Visi besar Islam ini harus dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan dan bukan serampangan. Apa dan bagaimana konsep yang dikandung dalam pengertian *rahmat* ini. Menurut Arragib al-Asfahani bahwa secara teologis diyakini bahwa rahmat berupa nikmat dan kemuliaan, berasal dari Allah Swt. sedang yang berasal dari sesama makhluk adalah kelembutan dan kasih sayang.<sup>10</sup>

Dengan demikian, polarisasi rahmat menunjukkan bahwa sepanjang berasal dari sesama makhluk ia menunjukkan dimensi psikologis, sedang nikmat dari Allah terbagi pada inmaterial maupun material. Berkaitan dengan rahmat yang berasal dari sesama, maka sumber rahmat bermula dari dimensi psikologis. Dimensi ini, jika dikembangkan lebih jauh akan melahirkan subdimensi berupa iman dan jiwa. Karena itu orang yang mengembangkan dimensi psikologis, memungkinkan memperoleh

---

<sup>10</sup> Al-Raghib al-Asfahany, *Mufradat al-Fadh al-Qur'an* (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.), 347.

penambahan keimanan dan juga ketenangan jiwa. Pada tahap ini yang bersangkutan akan memperoleh nikmat dari Allah Swt.

Perolehan manfaat dari visi besar Islam ini oleh Ibnu Abbas seperti yang dinyatakan oleh Aththabary bahwa, ini akan diarahkan untuk orang mukmin dan non mukmin. Menurutnya, untuk orang mukmin diberikan hidayah dan perbuatan yang berorientasi amal shaleh, dan non-muslim dilakukan penundaan ganjaran yang berbeda dengan umat terdahulu.<sup>11</sup> Untuk ganjaran ini, menurut hemat penulis, secara teologis merupakan ranah otoritas Allah Swt. dan bukan ranah hamba-Nya (umat Islam). Dalam kaitan ini, mengikuti polarisasi yang dibangun oleh Arraghib tentang *rahmat* (visi besar Islam), maka untuk hubungan antarsesama, tampaknya substansinya adalah pengembangan sikap kasih sayang.

Kalau dilihat dari sisi sejarah Islam, terutama dari kemanusiaan, tampaknya kemerosotan moralitas terjadi sebelum Muhammad diutus menjadi rasul dengan kata lain kondisi masyarakat dalam pra kerasulan Muhammad ditandai dengan ketidakmampuan berkembangnya rahmat atau visi besar Islam. Sedang kondisi masyarakat pasca kerasulan Muhammad, maka kerahmatan dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mengapa dua kondisi ini berbeda. Jawabannya, bahwa ajaran Islam dimaksudkan untuk menciptakan atmosfir *rahmat* di kalangan masyarakat dan lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa atmosfir rahmat itu didukung oleh umat Islam secara individual untuk menjadi penebar rahmat baik untuk dirinya maupun lingkungan sosial mereka. Kesuksesan Nabi Muhammad melakukan perubahan besar dalam sejarah kemanusiaan ini, karena dalam pengembangan visi besar Islam ini dilandasi karakter yang mendukung efektifnya visi besar ini. Pandangan ini didasarkan pada hadis nabi yang populer itu, *innama bu'itstu liutam-mima makarimal ahlaq.*

---

<sup>11</sup> Aththabari, "Jamiu al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an," dalam *Program Maktabah Asy-syamilah*, Juz XVIII, 552.

## Kearifan Lokal: Budaya Berbasis Kemanusiaan

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu, dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.<sup>12</sup> Mitos, mistik, kepercayaan dan kearifan lokal. *Myths, mystics, believes and wisdoms*.<sup>13</sup> *Local wisdom* (kearifan lokal/setempat): dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>14</sup> Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menurut Dede Suryadi terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan tepa selira (toleransi). Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka. Tak mengherankan, nilai-nilai kearifan lokal ini dijalankan tak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia, tetapi menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.<sup>15</sup>

Bagi masyarakat di Papua, hadirnya ungkapan misalnya *kitorang*, ungkapan *padaidi* (Bugis), *paraikatte* (Makassar), yang kesemuanya mengakui keberadaan sesama manusia dalam konsep kebersamaan. Bagi suku Bugis berbagai pernyataan yang dikenal dengan petuah dapat dikemukakan untuk mengenal pernyataan verbal terkait dengan kearifan lokal. Misalnya, konsep *cappa* yang sudah populer di suku Bugis. Konsep ini menurut penulis, terkait dengan hubungan antar person dalam kehidupan suku Bugis, untuk memenuhi eksistensinya baik dalam hubungan keluarga dan kekuasaan. *Cappa* yang diartikan ujung sesuatu

---

<sup>12</sup> [www.planasPRB Indonesia](http://www.planasPRB Indonesia). Diakses pada 28 November 2010.

<sup>13</sup> [www.kearifanlokal.blingspot.com](http://www.kearifanlokal.blingspot.com). Diakses pada 28 November 2011.

<sup>14</sup> Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," <http://desaingrafisindonesia>. Diakses pada 28 November 2011.

<sup>15</sup> Dede Suryadi, "Berawal dari Kearifan Lokal," *SWA Online*. Diakses pada 28 November 2011.

benda yang meliputi tiga model: a. *cappa lillah* (ujung lidah); b. *cappa kawali* (ujung atau pisau: perisai); dan c. *cappa la marufe* (ujung kelamin lelaki).

Tafsir sosialnya akan menyatakan, bahwa model a, dimanfaatkan untuk membangun komunikasi verbal dengan orang per orang dan masyarakat. Komunikasi verbal menurut Bugis tidak hanya sekadar mengeluarkan pernyataan, tetapi merupakan produk dari proses berpikir. Dalam proses berpikir ini, terdapat kecakapan yang harus dibangun misalnya, kemampuan memilih dan memilih kata, kejelian melihat kondisi, serta motivasi pernyataan. Dalam petuah Bugis ditemukan ungkapan *aja mualai miccu pute bicaramu ripadamu rupa tau* (jangan jadikan pernyataan-pernyataan Anda kepada sesama sebagai ludah yang berwarna putih).

Dalam tradisi Bugis, orang tua memiliki dua bentuk warna ludah, yakni merah dan putih. Bagi yang berwarna putih merupakan ludah yang diakibatkan oleh sang pelaku yang sering mengunyah daun sirih, sedang ludah yang berwarna putih seperti halnya kebanyakan masyarakat yang tidak terbiasa mengunyah daun sirih. Bagi pengunyah daun sirih, ludah mereka tersimpan pada wadah khusus. Kondisi ini berbeda dengan orang yang tak mengunyah daun sirih ludah (berwarna putih), ditempatkan tanpa wadah khusus. Petuah dimaksud melarang Anda secara bebas mengumbar pernyataan-pernyataan verbal kepada sesama. Berkaitan dengan kondisi masyarakat dalam era informasi ini terdapat pandangan yang menyatakan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan sebagai bagian dari kearifan lokal sudah mulai terkikis di dalam lingkungan budaya lokal komunitas.<sup>16</sup>

## **Pengembangan Budaya Lokal dan Ajaran Islam**

Dalam Islam istilah *al-ma'ruf* mengandung arti bahwa sesuatu yang mengandung makna kebaikan. Makna ini mengandung sebagai sesuatu

---

<sup>16</sup> Albert Buntoro, "Pudarnya Kearifan Lokal," *The Institute for Ecosoc Righs*. Diakses pada 28 November 2011.

yang dipandang hidup dalam masyarakat dan dipandang bernilai baik. Dan karena itu ada kaidah fikih yang dikenal dengan *al-'adat muhakkamah*. Tradisi yang baik, sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Tentu saja tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian nilai-nilai kearifan lokal dapat dipandang sebagai unsur yang dapat mendukung penciptaan adat yang bakal menjadi pertimbangan hukum.

Untuk kearifan lokal, perlu dicari ungkapan yang terkait dengan pembahasan dan untuk bugis maka dapat dikemukakan salah satu ungkapan terkait seperti: 1) *mammase-mase, enreki bolae tejjali tettappere banna mase-mase* (Silahkan mampir di rumah, tidak ada tikar kecuali hanya kasih sayang); 2) *resopa temmangingi naletei pammase dewata* (hanyalah usaha yang tidak mengenal lelah yang memungkinkan menjadi jembatan memperoleh rahmat dari Tuhan). Bagi suku Bugis tampaknya, ungkapan kasih sayang tidak hanya memiliki dimensi pada hubungan antarmanusia dalam lintas hubungan bertetangga, tetapi terkait dalam dimensi hubungan manusia dengan Tuhan dimensi kerja dan produktivitas.

Dua dimensi yang mengembangkan kasih sayang dalam kearifan lokal suku Bugis, tidak terlalu susah mencari relevansinya dengan ajaran Islam. Dalam al-Qur'an dikenal ayat *hablun minallah wa hablun min annas*. Menurut ayat ini manusia ditimpa kehinaan di manapun berada, kecuali yang mengembangkan pola hubungan baik antara Allah dan hubungan dengan manusia. Bagaimana dengan pembentukan karakter bangsa dengan menjadikan tiga aspek ini sebagai suatu landasan. Untuk menjawab ini kita harus didudukkan kembali nilai-nilai Islam dan nilai kearifan lokal dan kebangsaan sebagai landasan dasar. Landasan ini terwujud dengan melakukan sinergi antara ketiganya (nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kearifan lokal) dalam menyelesaikan problematika sosial umat manusia yang kesemuanya berpangkal dari pengembangan karakter.

Ketidakkampuan menjadikan landasan ini sebagai penyelesaian problematika, maka penyelesaian itu dipandang tidak tepat dan dipan-

dang tidak konsisten dengan perwujudan nilai-nilai kebangsaan dan keIslaman dan kearifan lokal. Dalam Islam, dikenal antara hasil, pengaruh dan proses dalam sebuah aktifitas harus dilakukan secara “linear” dengan nilai-nilai Islam. Bahkan dalam kondisi yang paling minimal sekalipun, proses didahulukan dibanding dengan lainnya. Apakah *ke-rahmatan lil alamin* sebagai visi besar Islam itui dapat secara otomatis teraplikasi tanpa melibatkan dua unsur lainnya. Hemat penulis dibutuhkan dari masing-masing ketiga landasan ini untukmelihatkan unsur internal yang berfungsi sebagai perekat. Dalam ajaran Islam dikenal unsur perekat yaitu yang meliputi: *al-mizan*, *al-qishtu*, *al-qdl*, dan dalam kearifan lokal dikenal terma yang mengandung ajaran dasar, *lempu*, *getteng*, *sitinaja*. Dalam kehidupan kebangsaan kita mengenal *bhinneka tunggal ika*.

Telaah konsep *al-mizan*, sebagai unsur perekat rahmat dapat ditelaah lebih jauh. Kata *al-mizan* berakar dari huruf *wau*, *za* dan *nun* yang mengandung konsep yang memiliki unsur keadilan dan konsistensi, ukuran sesuatu.<sup>17</sup> Kalau pandangan ini dapat diterima kiranya dapat dinyatakan bahwa gagasan ini mengandung standarisasi, kriteria atau procedural atau SKP. Untuk kehidupan dalam era in isangat penting, karena masyarakat semakin kritis. Hal-hal yang bersifat global, umum dan diterima begitu saja, tanpa umpan balik informasi dan koreksi serta revisi, kelihatannya tidak lazim lagi dalam era ini. Dalam era ini masyarakat cenderung untuk memilih pola pikir yang, transparan, bertanggung jawab, terinci, jelas dan terukur. *Al-qistu*,<sup>18</sup> yang diartikan sebagai distribusi keadilan yang bersifat proporsional<sup>19</sup> kiranya dapat diartikan sebagai bahwa *rahmatan lil alamin* dapat saja diraih seseorang berdasarkan prestasi yang dikembangkannya sebelum rahmat tiba padanya. Dalam konteks ini kiranya, pencegahan konplik dapat dilakukan dengan mengembangkan

---

<sup>17</sup> Al-Ragib al-Asfahany, *Mufradat al-Fadh al-Quran* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992), 868.

<sup>18</sup> Disebut *al-Adl wal Wannasab*, *Maqayis*, Juz V, 71.

<sup>19</sup> Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali, 1995), 214.

telaah kebutuhan dari kelompok masyarakat. Telaah kebutuhan dari pelaku dapat dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat untuk memenuhi dan tidak memenuhi.

Pengembangan nilai ini dalam konteks hubungan antar sesama pada era ini, adalah pemberian hak-hak yang menghargai profesionalisme. Penghargaan profesionalisme, menunjukkan pemberian penghargaan yang sepadan dengan kontribusi yang diberikan. Besaran kontribusi yang diberikan terhadap sesuatu berbanding lurus dengan penghargaan yang diberikan. Pandangan terhadap nilai sesuatu ditentukan tidak hanya pada berwujudnya sesuatu, tetapi terkait dengan proses: pencarian gagasan, rekonstruksi gagasan, pengembangan gagasan, sampai pelaksanaan gagasan. Bangunan profesionalisme sebagai tuntutan masyarakat informasi tidak dapat berkembang pesat di kalangan umat Islam, karena mereka tidak memandang hal ini sebagai pengamalan ajaran Islam. Mengabaikan profesionalisme, akan membuka peluang untuk terjadinya ketidakadilan atau yang dalam bahasa agama disebut *dhulm*.

Al-adl,<sup>20</sup> yang diartikan sebagai distribusi keadilan yang bersifat pemerataan, dalam konteks visibesr besar Islam kiranya dipahami bahwa semua orang dapat memperoleh rahmat dalam konteks sebagai sesama tanpa melihat prestasi yang diperolehnya. Dalam konteks pengembangan kebersamaan ini, maka pengembangan gagasan universalitas Islam perlu dikembangkan lebih dalam. Untuk kearifan lokal misalnya ditemukan sejumlah ungkapan yang perlu dikembangkan lebih jauh. Misalnya dalam bahasa Bugis (*lempuyang* diartikan jujur, *getteng* yang diartikan tegas serta *sitinaja* yang diartikan kepantasan) menurut hemat penulis konsep ini mendukung pengembangan ketiga konsep yang diajukan dalam Islam. Peruntukan kearifan lokal sebagai salah aspek landasasn pengembangan karakter berpotensi untuk dikembangkan. Secara teoretis dapat dikemukakan pandangan Fukuyama tentang kearifan lokal. Bagi Francis Fukuyama, penulis buku *Trust the Social Virtues and the Creation of Prosperity*, kearifan lokal merupakan modal sosial yang dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan

---

<sup>20</sup> Disebut *al-istiwa*, yakni pemertaan *wijaj* yakni keadaan menyimpang.

ekonomi masyarakat. Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi, dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh di antara sesama pelaku ekonomi.<sup>21</sup>

Perilaku menegakkan keadilan merupakan bagian dari masyarakat informasi dan bahkan merupakan bahagian dari pilar dalam peradaban. Dalam hubungan sosial, keadilan diperlukan tidak hanya ketika terjadinya ketidakadilan, tetapi cara berpikir yang berkeadilan itu amat diperlukan. Keadilan tidak dapat terwujud secara adil ketika tidak dilakukan dengan mengikut prosedural keadilan pula, tegasnya bahwa keadilan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam unsur c pada uraian terkait dengan Q.S. al-Anfal: 159. Dalam kehidupan *social procedural* keadilan diatur lebih sistematis oleh negara. Alquran Surah al-A'raf: 159 memberikan petunjuk tentang kebenaran dan keadilan yang ditegakkan secara bersamaan.

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

Ayat ini memberikan informasi kepada umat Islam: a) untuk belajar dan dapat memilih tempat pembelajaran di luar dari kelompoknya sendiri; b) Materi belajar umat Islam adalah tipe orang yang member petunjuk; c) Orientasi kebenaran adalah menegakkan keadilan. Untuk pengembangan karakter bangsa, maka bagi ormas Islam berpeluang untuk mensinergikan landasan yang dapat berfungsi menjadi tiga sumber nilai, yaitu nilai-nilai keIslaman, kebangsaan dan lokalitas. Ketiga sumber nilai ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dalam kaitannya dengan sumber nilai pembentukan karakter ini, maka tidak perlu mengambil dari ketiga hal yang bertentangan dengan ketiga sumber nilai tersebut.

<sup>21</sup> Dede Suryadi, *Berawal dari Kearifan Lokal*, 5.

Hemat penulis ketiga sumber nilai ini sudah cukup untuk dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa.

### Identifikasi Peran Ormas Islam

Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah bagaimana peran NU dalam mengawal era ini agar diarahkan pada pembangunan karakter bangsa. Hemat penulis ada tiga peran yang harus dilakukan. *Pertama*, pengawal tiga landasan pembangunan karakter bangsa. Pengawal ketiga landasan ini dipandang penting: Ormas Islam, secara sosiologis menjadi penggerak kehidupan umat. Ormas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan umat Islam. Ormas Islam memiliki rumusan strategi tersendiri dalam mendekati umat Islam pada satu sisi dan tingkat penerimaan gagasan-gagasan dari ormas Islam kepada umat, dipandang relatif masih terjalin pada sisi lain.

*Kedua*, pengemban nilai-nilai pengabdian. Pengembanan nilai ini penting mengingat dalam Islam manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah Swt. “*Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya’buduni*”. Pengabdian merupakan orientasi dalam kehidupan. Jangan ada yang diharapkan kecuali keridhaan Allah Swt. Karakter inilah yang harus dibangun bagi peserta didik termasuk seluruh warga NU. Tempuhlah hidup ini dengan penuh pengabdian yang ikhlas kepada Allah Swt. Bagi bangsa Indonesia, untuk membangkitkan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika, maka semangat pengabdian ini harus dipupuk dan dikembangkan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai pengabdian ini, menjadi pendorong dalam mencapai kemerdekaan bangsa ini. Ormas Islam dituntut untuk mendorong umat agar memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Upaya itu dilakukan selain dalam bentuk program juga memungkinkan untuk mengemukakan berbagai person dalam Islam dan pahlawan nasional, maupun pejuang dari daerah tertentu.

*Ketiga*, pengemban masyarakat produktif. Karakter ini menunjukkan bahwa bagi jamaah NU termasuk seluruh warga diarahkan pada

penciptaan manusia yang menjunjung tinggi sikap produktif. Hal ini menjadi pengamalan dari hadis Nabi Saw., *khairunnasi anfaahum linnas* (sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama). Ormas Islam, kiranya mendorong masyarakat agar menjadi umat yang produktif dan tidak konsumtif semata.

*Keempat*, pengemban nilai-nilai kebersamaan. NU ini merupakan suatu organisasi, tanpa kebersamaan maka tidak mungkin organisasi ini berkembang seperti sekarang. KH. Hasyim Asy'ari dalam *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi* mengatakan bahwa manusia pasti harus bermasyarakat, bercampur dengan orang lain, karena seorang tidak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umat dan menolak keburukan dan ancaman bahaya dari padanya.<sup>22</sup> KH. Hasyim Asy'ari mengukir sejarah dalam membangun NU tanpa kebersamaan maka NU ini tidak akan eksis lagi.

Untuk memerankan ketempat hal itu, maka diperlukan upaya infroviisasi. Pandangan perlunya infrovisasi pernah mengemuka dikalangan litbang pendidikan nasional. Merurut Ka Litbang ketika itu, bahwa dibutuhkan improvisasi bagi guru untuk melakkan upaya-upaya pembangunan karakter.<sup>23</sup> Pengembangan daya kritis bagi bangsa ini, dapat saja memberikan nilai tambah dalam kehidupan ini, jika didukung oleh karakter yang bersumber dari tiga landasan pembangunan karakter selanjutnya, daya kritis itu diarahkan pada ketiga sasaran lainnya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka pembangunan karakter akan mengalami kegagalan.

## **Menatap Reformasi Pendidikan Nasional**

Dalam telaah kritis dan evaluasi terhadap sistem pendidikan Nasional pada masa Orde Baru, H.A.R. Tilaar sering mengemukakan bahwa ada

---

<sup>22</sup> Hadratussuyikh KH. Hasyim Asy'ari, "Muqaddimah al-Qanun Asasi," dalam *Bulletin AN-Nahdli*, No. 1/ Juni 2012.

<sup>23</sup> Mansyur Ramli, "Kembali Fokus ke Pembangunan Karakter," 6.

tiga faktor yang menjadi kelemahan dasar sistem pendidikan nasional pada saat itu dan menyebabkan kegagalan pendidikan di Indonesia. Kelemahaan tersebut adalah, *pertama*, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian, kurikulum, materi ujian, sistem evaluasi, dan sebagainya. Pada aspek kurikulum, penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi atau sekolah hampir tidak diberi ruang untuk menyusun atau mendesain kurikulum yang akan diajarkannya sendiri, sementara negara kita terdiri dari aneka ragam suku, budaya, agama dan mendiami gugusan pulau dari Sabang sampai Mauroke. *Kedua*, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat dengan menganggap dan memposisikan masyarakat hanya sebagai objek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak punya daya atau kemampuan untuk ikut merumuskan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat/daerah. *Ketiga*, sistem birokrasi pendidikan. Pada masa Orde Baru birokrasi pendidikan seringkali dijadikan alat kekuasaan oleh kepentingan tertentu atau alat politik penguasa. Birokrasi model ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN dan melemahkan budaya prestasi kerja dan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga pendidikan di perguruan tinggi atau pun sekolah.

Memasuki abad reformasi sejak tahun 1998, lembaga pendidikan juga mengalami perubahan sebagai konsekwensi dari tuntutan reformasi di semua sektor. Sudah barang tentu, dalam reformasi pendidikan nasional bukan hanya melakukan desentralisasi pendidikan yang berarti kekuasaan politik berpindah dari pusat (Jakarta) ke kabupaten/kota ataupun ke birokrasi perguruan tinggi. Jika hanya diartikan sesederhana itu, tidak mustahil kelemahan sistem pendidikan nasional yang pernah ada pada masa Orde Baru akan kembali dengan berbungkus muka baru mencekoki sistem pendidikan kita sekarang. Adapun yang berubah hanyalah para pelakunya; sebelum masa reformasi dilakukan oleh pejabat Jakarta dan setelah reformasi dilakukan oleh pejabat perguruan tinggi atau pejabat daerah. Kalau hanya ini yang terjadi tidak mustahil pula akan terjadi politisasi pendidikan semakin kental dengan tingkat peluang KKN yang tidak berkurang.

Reformasi di sini diartikan sebagai penataan kembali secara total terhadap formula sistem pendidikan nasional dengan *me-review* dan mengevaluasi kelemahan dan kekuarangan sistem yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Salah satu faktor dominan yang dipraktikkan pada masa orde baru adalah sentralisasi pendidikan pada segala bidang. Maka jalan keluar yang harus diambil dalam reformasi pendidikan nasional adalah tekad untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Hal ini tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana pendidikan termasuk hal-hal yang disentralisasikan. Desentralisasi pendidikan biasanya didefinisikan dengan *the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organization, local government, or non-government organization*. Salah satu bentuknya adalah terwujudnya manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah/ perguruan tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Sebagai gambaran perlu dikemukakan tiga model desentralisasi pendidikan, yaitu, *pertama*, manajemen berbasis lokasi; *kedua*, pengurangan administrasi pusat; *ketiga*, inovasi kurikulum. Kalau diperhatikan sebenarnya ketiga model tersebut saling terkait. Ketiga suatu sekolah atau perguruan tinggi manajemen berbasis lokasi, konsekuensi logisnya adalah tidak ada lagi intervensi birokrasi pusat dan secara otomatis pula kurikulumnya menjadi wewenang sekolah/ perguruan tinggi karena lebih mudah mengadakan evaluasi dan sekaligus inovasi.

Prioritas utama lainnya dalam reformasi pendidikan nasional adalah pengikisan praktik-praktik tercela yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Praktik-praktik tercela tersebut tetap harus dihentikan apabila kita ingin mempunyai suatu sistem pendidikan nasional yang dapat membawa masyarakat Indonesia kepada suatu masyarakat terbuka, demokratis, dan pendidikan yang bermutu. Usaha tersebut bergandengan dengan usaha untuk menegakkan asas profesionalisme di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Suatu reformasi hanya akan sukses apabila pelaksananya adalah manusia-manusia yang bersih.

H.A.R. Tilaar telah merumuskan sebelas program reformasi sebagai agenda prioritas dalam melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan hasil orde baru. Kesebelas agenda reformasi pendidikan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pengikisan korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme.
2. Melaksanakan asas profesionalisme.
3. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dan isi kurikulum.
4. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
5. Peningkatan sekolah menengah umum dan kejuruan.
6. Peningkatan mutu dan otonomi pendidikan.
7. Pengembangan pendidikan alternatif.
8. Peningkatan mutu profesi guru dan dosen.
9. Pembiayaan pendidikan yang demokratis.
10. Peraturan dan undang-undang yang mendukung.
11. Pemberdayaan mahasiswa.

Salah satu tuntutan reformasi yang sering dibicarakan adalah kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi. Pada masa Orde Baru, kebebasan akademik dan otonomi akademik sangat sulit diperoleh perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri, sehingga tidak sedikit para akademisi hanyut dalam ranjau-ranjau kepentingan penguasa dan terjebak sebagai corong penguasa politik. Akibatnya marak penelitian pesanan serta tekanan dan pembatasan terhadap gerakan mahasiswa sebagai *agent of social* di berbagai kampus di Indonesia. Ketika pemerintah memberi dana kepada sebuah perguruan tinggi, tidak berarti oknum pemerintah yang memberi dana boleh semaunya membuat ketentuan agar perguruan tinggi tersebut tunduk kepada kepentingan pribadi mereka. Posisi yang paling tepat bagi pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan nasional adalah bertindak sebagai distributor dan fasilitator, bukan sebagai penguasa yang memberikan dana dengan syarat yang ditentukan. Namun hal ini, tidak berarti pemerintah harus cuci tangan terhadap kehidupan perguruan tinggi, tidak pula pemer-

intah hanya memberi dana tanpa terlibat selain dana. Menurut hemat penulis, pemerintah khususnya lembaga legislatif dan yudikatif harus mampu bertindak sebagai pengawas agar kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi tidak disalahgunakan.

Dalam waktu bersamaan, mentalitas orang-orang perguruan tinggi juga harus diperbaiki. Perguruan tinggi harus menjunjung tinggi *integrity* dan *academic ethics*, termasuk dalam kebebasan mimbar akademik, bukan menjadi stempel untuk legalisasi kezaliman. Tanggungjawab sebagai kelompok akademis yang berfungsi *agent of change* dan *social of control* harus benar-benar ditegakkan. Penelitian yang diadakan memang atas kaidah keilmuan, bukan atas dasar KKN demi untuk mendapatkan dana. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang seharusnya mampu bertindak secara objektif dan independent dan selalu menjunjung tinggi integritas etika akademik. Otonomi akademik juga hendaknya menancap pada setiap perguruan tinggi untuk menegakkan kebenaran (hati nurani) yang pada akhirnya mampu meningkatkan kecerdasan, kesiapan SDM berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat.

## **Quo Vadis Perguruan Tinggi Islam**

Perguruan tinggi Islam adalah salah satu pilar utama sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang seutuhnya. Eksistensi dan peran perguruan tinggi Islam diharapkan memberi warna bagi peningkatan iman dan takwa (imtak) dalam menginternanalisisi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Keseimbangan antara kemajuan iptek dengan imtak diharapkan menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki tanggungjawab dunia akhirat sebagai esensi semua ajaran agama. Karena kemajuan iptek yang dilepas dari dimensi agama ataupun sebaliknya, akan menjebak manusia dalam kegagalan yang sesungguhnya, seperti yang ungkapan Albert Einstein, “*science without religion is blind, religion without science is lame*”.

Peran perguruan tinggi Islam dalam dunia akademik tidak hanya

diletakkan dalam lingkup membenaran, melainkan yang lebih penting lagi diletakkan dalam lingkup penemuan visi baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinyalemen-sinyalemen Allah, baik dalam ayat-ayat *qauliyah* maupun *qauniyah*, harus dipahami dan diberi interpretasi yang *up to date*. Interpretasi maupun reinterptasi akan menjadikan agama siap dan mampu berdialog dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga perguruan tinggi Islam tentunya bukan hanya melakukan pengulangan-pengulangan terhadap ilmu-ilmu normatif dan ritualistik, namun lebih berperan sebagai celupan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Persoalan yang mendasar yang harus dijawab adalah mampukah lembaga perguruan tinggi Islam memayungi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga senantiasa berada pada rel agama dan memperoleh inspirasi dari wahyu Allah. Sejak awal sampai akhir abad ke-20, negara-negara Muslim membiarkan adanya dua sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan umum yang dinasionalisasikan dengan menambah sampai empat mata pelajaran agama Islam dan sistem pendidikan Islam yang berasal dari zaman klasik yang tidak diperbaharui secara mendasar. Kondisi ini menunjukkan adanya dikotomi yang sesungguhnya merupakan perwajahan nyata dari nilai-nilai sekuler. Jika saja terlihat adanya usaha untuk memecahkan persoalan dikotomi ini, seringkali tidak dimulai dari akar masalahnya yaitu dikotomi epistemologi yang memberi corak keseluruhan sistem pendidikan. Misalnya, perubahan IAIN menjadi UIN belum sepenuhnya mencerminkan sistem pendidikan Islamik yang integratif, karena hanya berbeda dengan perguruan tinggi umum dalam hal struktur institusionalnya saja, dimana UIN hanya melakukan penambahan fakultas-fakultas umum. Pada tahap epistemologi, fakultas agama masih tetap tidak membahas masalah sosial dan alam, sementara fakultas umum belum memiliki kerangka dasar epistemologi yang Islami. Disamping belum Islaminya epistemologi di perguruan tinggi Islam, sistem birokrasi lembaga perguruan tinggi Islam juga belum mencerminkan nilai-nilai Islami. Kepemimpinan di perguruan tinggi Islam lebih mencerminkan kepala kantor atau pemimpin proyek daripada sebagai pemimpin lembaga

akademik yang mewujudkan masyarakat ilmiah yang Islami. Mereka kelihatannya lebih terampil mengatur lalulintas dana atau siapa-siapa yang pantas mendapat jatah untuk penelitian, perjalan dinas luar daerah dan siapa-siapa yang perlu dibukam kevakalannya, tetapi sama sekali tidak terampil dalam membuat perencanaan pengembangan masyarakat ilmiah yang Islami.

Dewasa ini kita tengah menyaksikan proyek tranformasi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri. Tranformasi ini perlu diapresiasi secara positif karena merupakan upaya dan jawaban perguruan tinggi Islam mengikuti tuntutan global. Hanya saja secara aplikatif, cita-cita dan ruh pengintegrasian ilmu pengetahuan belum dapat dilakukan secara sempurna dari upaya transformasi tersebut. Sepertinya, pengintegrasian yang dilakukan dalam transformasi IAIN masih normatif dengan hanya mendekatkan atau menggabungkan secara kelembagaan dua faksi yang berbeda (ilmu pengetahuan dan agama), bukan dalam satu kesatuan yang ilmu yang utuh, sebagaimana konsep dasar ilmu pengetahuan Islam yang sebenarnya. Bila transformasi ini tidak dikawal dalam perpektif epistomologi Islam maka akan memunculkan bahaya laten sebagaimana yang telah dialami oleh dunia Barat karena memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama. Janganlah kita hidup dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain dengan meninggalkan nilai-nilai yang disemaikan di IAIN sebelumnya. Kekhawatiran yang akan muncul di sini dan telah mulai nampak adalah akan tertinggalnya pendidikan agama Islam dalam perspektif kelembagaan fakultatif di Universitas Islam. Masyarakat lebih cenderung memilih dan menekuni ilmu pengetahuan umum di fakultas umum dibanding fakultas ilmu agama. Hendaknya Universitas Islam yang didambakan adalah menjadikan agama Islam sebagai faktor integratif di dalam pengembangan fakultas-fakultas ilmu murni. Mari kita buka mata dan hati yang lebar-lebar, akankah perguruan tinggi Islam yang telah ganti kulit menjadi dambaan masyarakat Islam ke depan?

## Penutup

Masyarakat informasi termasuk umat Islam Indonesia membutuhkan landasan dalam membangun karakter bangsa penggalan landasan ini mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan umat Islam, serta realitas pilihan untuk hidup dalam sebuah komunitas yang disebut dengan kebangsaan dan pandangan leluhur yang berperadaban. Penggalan ketiga landasan ini penting agar dalam era ini umat Islam di Indonesia tidak kehilangan jati diri dalam memakna ajaran Islam yang diaplikasikan dalam dunia yang penuh dinamika yang cukup tinggi. Rumusan tentang landasan ini yang bersifat konseptual masih dibutuhkan lebih lanjut. Umat Islam Indonesia yang cenderung menjadikan organisasi keagamaan sebagai patron, dalam berteologi, menuntut pentingnya Ormas Islam untuk merumuskan landasan pembangunan karakter.

## Daftar Pustaka

- Anton, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Aththabari. "Jamiu al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an." *Program Maktabah Asyasyamilah*. Juz XVIII.
- Asy'ari, Hadratussyikh KH. Hasyim. "Muqaddimah al-Qanun Asasi." *Bulletin an-Nahdli*. No. 1 (Juni 2012).
- Buntoro, Albert. "Pudarnya Kearifan Lokal." *The Institute for Ecosoc Righs*, 28 November 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim. "Assiyasah asy-Syar'iyah." dalam program *Maktabah asy-Syamilah*.
- Nurhikmah*. "Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Karakter." *Makalah*. Seminar Nasional Berwawasan Kebangsaan

dan Kampanye Pendidikan Karakter bagi Pelajar SMA oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pemuda Indonesia (LP3I) Kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri, di Makassar, pada 12 Mei 2012.

al-Raghib al-Asfahany. *Mufradat al-Fadh al-Quran*. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992.

Ramli, Mansyur. "Kembali Fokus ke Pembangunan Karakter." *Harian Fajar*, Edisi 2 Mei 2011.

Salim, Abd. Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali, 1995.

Sartini. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati." <http://desaingrafisindonesia>. Diakses pada 28 November 2011.

Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Tera Indonesia, 1998.

\_\_\_\_\_. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Usa, Muslih. *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

[www.planasPRB Indonesia](http://www.planasPRBIndonesia). Diakses pada 28 November 2010.

